

## **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP JUMLAH PENGUNGKAPAN PSAK BERBASIS IFRS**

**Vanica Serly**

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

[vani.serly@yahoo.com](mailto:vani.serly@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting Standard (PSAK) convergence to International Financial Reporting Standards (IFRS) in manufacture companies in 2011-2012. Furthermore, this study aims to determine the effect of the structure of corporate governance (CG), ownership structure and company characteristics to the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting Standards convergence to IFRS. Structure of corporate governance is measured by proportion of independent commissioner and audit committee. While ownership structures are measured by ownership concentration, international ownership and institutional ownership. Company characteristics are measured by size of the company, profitability and leverage. These results indicate that the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting Standards convergence to IFRS in the manufacture companies is 80.33%. The multiple regression test showed that structure of corporate governance variables that affect compliance is the proportion of independent commissioner, the number of audit committee, ownership concentration, international ownership, institutional ownership, profitability and leverage had no effect on the level of disclosure compliance with Indonesia Accounting Standards convergence to IFRS. While the variable, namely size of the company had effect on the level of disclosure compliance. The regression also showed that the variable had  $R^2 = 0.109$ , it means that the independent variable only influence the dependent variable for 10.9%.*

*Keyword: corporate governance, ownership structure, IFRS*

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi pasar modal meningkatkan kebutuhan keseragaman pemahaman pelaporan keuangan. IASC, (*International Accounting Standard Committe*) sebagai dewan pembuat standar, telah memulai gagasan standar akuntansi global semenjak tahun 1973 – 2000 yang dikenal dengan IAS (*International Accounting Standard*). Estafet ini kemudian dialihkan kepada IASB (*International Accounting Standard Board*) pada tahun 2001. IASB mengadopsi seluruh IAS dan memperkenalkan standar akuntansi baru dengan nama IFRS atau *International Financial Reporting Standards* (Ball, 2006). IFRS sebagai standar akuntansi global diterima dan didukung lebih dari 120 negara dan badan internasional dunia (IAI, 2012). Indonesia sebagai anggota G-20 sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi keuangan dengan standar akuntansi yang

disyaratkan oleh IFRS. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebagai badan pembuat standar di Indonesia telah mencanangkan program konvergensi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) ke IFRS secara bertahap. Peralihan standar akuntansi keuangan menjadi PSAK berbasis IFRS telah dimulai semenjak tahun 2004 dan rampung pada tahun 2011. Saat ini seluruh PSAK secara signifikan telah sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 (IAI, 2012). Implementasi secara penuh diharapkan telah dimulai oleh perusahaan terdaftar di pasar modal Indonesia pada 1 Januari 2012.

Program konvergensi IFRS ke dalam PSAK Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan sektor privat di Indonesia. PSAK berbasis IFRS diharapkan mampu mengurangi hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan,

mengurangi biaya terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan mengurangi biaya modal perusahaan (Ball, 2006 dan IAI, 2012). Hal ini dikarenakan IFRS memiliki karakteristik yang tercermin dari prinsip dan standar yang digunakan. IFRS bersifat prinsip, banyak menggunakan nilai wajar, memerlukan pertimbangan profesional, dan mesyarakatkan pengungkapan yang tinggi dari perusahaan (IAI, 2012).

Setiap tahunnya, perusahaan menginformasikan segala bentuk aktivitas dan hasil perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk informasi yang diberikan perusahaan adalah pengungkapan (*disclosures*). Pengungkapan yang diberikan perusahaan memberikan nilai positif bagi perusahaan. Dengan pengungkapan yang tinggi, masalah informasi asimetris dan konflik agensi antara manajemen dan investor dapat dijumpai (Healy & Palepu, 2001). Perusahaan juga dapat mengurangi biaya modal dan meningkatkan arus kas masuk dari investor (Hassan & Marston, 2010).

Karakteristik IFRS mensyaratkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan IFRS yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Dengan persyaratan pengungkapan yang tinggi, perusahaan akan memberikan informasi secara penuh mengenai aktifitas-aktifitas perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Tingkat pengungkapan dalam IFRS adalah komponen penting yang menunjukkan kualitas pelaporan keuangan (Morris et al, 2012). Daske & Gebhardt (2006) menemukan bahwa kualitas pengungkapan meningkat secara signifikan seiring adopsi IFRS di Austria, Jerman, dan Switzerland. Sementara Aksu (2006) menemukan bahwa terdapat peningkatan nilai transparansi dan nilai pengungkapan yang semakin tinggi seiring adopsi IFRS di perusahaan terdaftar di Turki.

Di Indonesia masalah pengungkapan menjadi isu penting. Studi menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan dan kualitas pengungkapan di negara dengan pasar modal berkembang

cenderung lebih lemah daripada negara dengan pasar modal yang maju (Choi & Meek, 2008). Studi tentang *opacity*, lawan kata dari transparansi, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pasar modal berkembang di urutan 32 dari 35 negara yang diteliti (Choi & Meek, 2008). Lebih lanjut, studi lain menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengungkapkan 52% item pengungkapan, lebih rendah dari jumlah pengungkapan yang diberikan perusahaan-perusahaan di Asia, seperti Singapura (74%), Malaysia (73%) dan Filipina (68%) (Craig & Diga, 1998). Studi di atas menunjukkan bahwa Indonesia bermasalah dengan transparansi yang seharusnya dapat didukung dengan pengungkapan yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam) merupakan regulator pasar modal di Indonesia. Dalam kaitannya dengan konvergensi IFRS dalam PSAK, maka Bapepam mengeluarkan peraturan baru, nomor: KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik (Bapepam, 2012). Peraturan ini akan memberikan kepastian hukum bagi emiten dan perusahaan publik dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Diharapkan dengan peraturan ini, perusahaan terdaftar di Indonesia akan memenuhi regulitas pasar modal terkait dengan pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang diharapkan terlaksana 1 Januari 2012 ini.

PSAK berbasis IFRS tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan akan melakukan pengungkapan yang tinggi. Ball (2006) menyatakan bahwa IFRS dalam praktiknya mungkin saja tidak menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, dikarenakan perbedaan sistem hukum dan karakteristik regulasi lainnya. Untuk itu diperlakukan sistem institusional yaitu tata kelola perusahaan yang memonitor dan mengelola perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat membantu menjamin pengungkapan informasi yang memadai oleh perusahaan (Akhtaruddin et al, 2009). Kemudian Kent & Stewart (2008) meneliti tentang hubungan tingkat pengungkapan IFRS dan kualitas tata kelola pada perusahaan terdaftar di Australia dan menemukan hubungan positif

diantara dua variabel ini. Penelitian lain juga dilakukan oleh Verriest et al (2010) dan Tsalavoutas (2010) yang menemukan bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang kuat mengungkapkan standar IFRS yang lebih ekstensif dan spesifik.

Struktur kepemilikan juga mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Barako, 2007). Struktur kepemilikan sesuai dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dan kontrol yang melibatkan dua pihak yaitu manajemen dan pemegang saham. Pengungkapan yang tinggi dapat menjembatani konflik antara dua pihak ini, dikarenakan manajer memberikan informasi seluas-luasnya tentang aktifitas perusahaan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh investor. Utami dkk (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat pengungkapan konvergensi IFRS di perusahaan terdaftar di Indonesia.

Selain tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan juga mempengaruhi tingkat pengungkapan IFRS yang diberikan oleh perusahaan (Al Mutawwa, 2010). Fekete et al (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri berhubungan secara statistik dengan persyaratan pengungkapan IFRS di Hungaria. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Al Mutawaa (2010) bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri memiliki hubungan positif dengan pengungkapan IAS/IFRS. Karakteristik perusahaan lain diteliti oleh Omar (2012) yang menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IFRS di pasar modal Bahrain.

Penelitian mengenai jumlah pengungkapan IFRS merupakan kajian yang menarik untuk diteliti di Indonesia. Beberapa PSAK berbasis IFRS telah diimplementasikan oleh perusahaan semenjak tahun 2009 dan implementasi penuh diterapkan pada 1 Januari 2012. Karakteristik IFRS mensyaratkan perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang tinggi pada laporan keuangan, namun beberapa studi menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang dalam jumlah pengungkapan. Beberapa penelitian terkait dengan jumlah pengungkapan IFRS telah dilakukan oleh: Tsalavoutas et al. (2008) di Yunani; Al-Akra et al. (2010) di Yordania; Kent &

Stewart (2008) di Australia, Lopes & Rodrigues (2010) di Portugis dan lainnya. Di Indonesia sendiri, penelitian tentang pengungkapan dan konvergensi IFRS telah dilakukan oleh Prawinandi dkk (2012) dan Utami dkk (2012). Penelitian ini membahas tentang jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS dengan kaitannya dengan tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI untuk laporan tahunan 2011 dan 2012.

## TELAAH LITERATUR

### 1. Pengungkapan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Setiap tahunnya, perusahaan menginformasikan segala bentuk aktivitas dan hasil perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk informasi yang diberikan perusahaan adalah pengungkapan (*disclosures*). Gibbins et al (1990) dalam Hassan & Marston (2010) menjelaskan bahwa pengungkapan berisikan informasi keuangan dan non-keuangan, yang disajikan dalam bentuk angka atau kualitatif, diwajibkan atau sukarela, dan disampaikan secara formal atau informal. Pengungkapan sebagai bentuk transparansi perusahaan dibutuhkan agar investor luar dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi di perusahaan.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (IAI, 2012), pengungkapan dalam catatan laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyediakan sejumlah informasi tambahan yang signifikan mengenai item-item yang terdapat dalam laporan keuangan. Umumnya, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi yang menjelaskan, mengklarifikasi, atau mengembangkan item-item yang muncul dalam laporan keuangan (Schroeder et al, 2009). Pengungkapan mengenai PSAK berbasis IFRS dapat ditemukan di dalam laporan keuangan perusahaan (Schroeder et al, 2009), lebih lengkapnya dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan memperlihatkan bagaimana

pengaruh PSAK berbasis IFRS terhadap item-item keuangan perusahaan.

## 2. Pengembangan Hipotesis

### a. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan mekanisme pengawasan yang efektif karena independensinya terhadap manajemen. Hal ini juga sesuai dengan teori agensi yang memandang pengawasan terhadap tindakan manajemen diperlukan oleh perusahaan. Dalam teori agensi, kehadiran komisaris independen dalam dewan direktur perusahaan berkontribusi mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan direktur perusahaan (Khodadi, 2010). Lebih lanjut, komisaris independen dipandang sebagai mekanisme untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Adilah et al, 2010). Cheng dan Courteney (2004) dan Verriest et al (2010) menemukan bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen perusahaan, semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarelanya. Terkait dengan konvergensi IFRS, kehadiran komisaris independen dapat meningkatkan jumlah pengungkapan konvergensi IFRS yang diberikan perusahaan. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa & Cooke (2000), Cheng & Courteney (2004), Verriest & Thornton (2010), Adilah et al (2010), Khodadadi (2012) dan Samaha (2012) menemukan adanya hubungan positif antara jumlah komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

### b. Jumlah Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan bahwa (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut

temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit mengindikasikan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan kualitas pelaporan keuangan (Kent & Stewart, 2008). Barako (2006) dan Yuen et al (2010) menemukan hubungan positif antara keberadaan komite audit dengan tata kelola perusahaan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab komite audit meliputi sistem pengendalian internal yang merupakan mekanisme penting dalam peningkatan kualitas tata kelola perusahaan dan juga memastikan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Untuk itu dalam mencapai tujuannya, komite audit memastikan bahwa manajemen telah memperoleh informasi yang baik tentang keputusan perusahaan terkait dengan kebijakan akuntansi, praktik dan pengungkapannya (Yuen et al, 2010).

Komite audit adalah mekanisme yang penting untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen mengungkapkan lebih banyak informasi. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang positif antara jumlah komite audit dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Verriest (2010) menemukan bahwa keefektifan komite audit berhubungan signifikan positif terhadap jumlah pengungkapan standar IFRS di Eropa. Sementara Kent & Stewart (2008) menemukan bahwa audit komite yang sedikit malah akan meningkatkan jumlah pengungkapan IFRS. Hal ini dikarenakan, perusahaan-perusahaan di Australia sangat tergantung pada mekanisme tata kelola lain, yaitu auditor eksternal. Hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

### c. Konsentrasi Kepemilikan

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan lainnya (Dallas, 2004 dalam Nuryaman, 2009). Konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*) mungkin menyebabkan potensi permasalahan agensi yang

tinggi (Jensen and Meckling, 1976). Pemilik saham pengendali dan manajemen mungkin memperoleh keuntungan atas aktivitas perusahaan, seperti: dana pensiun atau *personal benefit*. Dengan tingkat struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, kompensasi manajer akan bersifat negatif atau positif akan tergantung kinerja perusahaan (Jiang et al dalam Yuen et al, 2009). Bagaimanapun dengan pemilik sebagai pemegang saham utama, akan menyebabkan konflik antara manajemen dengan pemegang saham luar. Dengan kata lain perusahaan yang terkonsentrasi pada pemilik akan memiliki pengendalian yang lebih besar terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali akan cenderung kurang independen dalam transparansi dan pengungkapan informasi, dikarenakan mereka dapat memperoleh langsung informasi dengan cara informal. Barako et al (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan tingkat pengungkapan sukarela di Kenya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H3 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

d. Kepemilikan oleh Pemegang Saham Asing

Barako (2007) menemukan hubungan yang positif antara proporsi kepemilikan asing dengan tingkat pengungkapan sukarela di Kenya. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan yang besar dari pemilik asing untuk mengawasi manajemen dengan tingkat pengungkapan yang diberikannya. Dengan kata lain, jumlah informasi yang diungkapkan manajemen akan sangat bermanfaat bagi investor asing dalam memonitor kinerja manajemen. Lopes & Rodrigues (2010) menyatakan bahwa semakin bersifat internasional suatu perusahaan maka semakin banyak informasi yang diungkapkan perusahaan kepada pemangku kepentingannya (pemegang saham, pemerintah atau konsumen) untuk memperlihatkan bahwa mereka telah mengelola perusahaan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H4 : Proporsi kepemilikan oleh pemegang saham asing berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

e. Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham Institusional

Posisi investor institusional dalam tata kelola perusahaan memegang peranan penting. Dalam kerangka teori, investor institusional menunjukkan mekanisme lain dalam tata kelola perusahaan yang kuat untuk bertindak sebagai pengawas manajemen perusahaan (Khodadadi, 2010). Ini dikarenakan karena mereka dapat mempengaruhi manajemen atau mengkoordinasikan kepentingan kelompok pemegang saham. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan yang bersangkutan. Terkait dengan *monitoring effect theory*, dimana adanya suatu mekanisme pemantauan dari luar perusahaan, investor institusional akan melakukan pengawasan yang lebih besar kepada manajemen (Ting dan Huang, 2009). Menurut Shleifer dan Vishny (1997) pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan yang lebih baik karena memperoleh informasi dari manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. Dengan kepemilikan saham yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat mengungkapkan secara sukarela informasi untuk memenuhi harapan pemegang saham besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Utami dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan konvergensi IFRS perusahaan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H5 : Proporsi kepemilikan oleh pemegang saham institusional berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi**

f. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menandakan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diprosikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung memiliki hubungan yang kompleks dengan para pemangku kepentingannya (Natalia & Zulaikha, 2012). Hal ini disebabkan karena jenis, jumlah dan

kepentingan setiap pemangku kepentingan berbeda. Oleh karena itu, perusahaan hendaklah menyediakan informasi-informasi yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan teori biaya politik (*political cost theory*), perusahaan dengan ukuran besar memiliki biaya politik yang tinggi, sehingga diharapkan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak (Lopes and Rodrigues, 2010). Selain itu, ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan juga berkaitan dengan teori agensi (*agency theory*). Untuk itu, pengungkapan akan menjembatani informasi asimetris dan mengurangi biaya keagenan suatu perusahaan.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan. Omar (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan di pasar modal Bahrain. Penelitian dengan hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Barako (2007) dan Ahmad & Primastuti (2012). Akan tetapi Natalia & Zulaikha (2012) dan Pramono (2011) tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

g. Tingkat Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau *profit*. Menurut teori sinyal (*signalling theory*), informasi dalam laporan keuangan dapat mengirimkan sinyal ke pasar (Ross, 1977). Informasi yang diungkapkan oleh manajer ke pasar dapat mengurangi informasi asimetri dan akan diinterpretasikan sebagai sinyal baik oleh pasar (Lopez & Rodrigues, 2010). Salah satu bentuk sinyal positif adalah profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung kelangsungan perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya profitabilitas perusahaan, akan membuka kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih banyak untuk

aktivitas bisnisnya. Sumber pendanaan yang banyak ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah dan jenis pemangku kepentingan, sehingga perusahaan perlu memperhatikan pengungkapan informasi yang dilakukannya. Sesuai dengan teori agensi, pihak luar mengamanatkan sejumlah dana kepada manajemen perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Bagaimanapun pihak luar tidak ikut mengelola perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengungkapkan informasi sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan meningkatkan jumlah pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan (Barako, 2007). Kemudian Kusumawati (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tata kelola di Indonesia. Ini dikarenakan, perusahaan cenderung mengungkapkan tata kelola ketika menghadapi penurunan profitabilitas. Penelitian lainnya menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara tingkat profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan ditunjukkan oleh Fekete (2008), Prawinandi (2012), Utami (2012), dan Omar (2012). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H7 : Tingkat profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

h. Tingkat *Leverage* Perusahaan

*Leverage* merupakan proporsi penggunaan hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya. Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik agensi timbul dikarenakan adanya pemegang hutang (*bondholders*) dalam struktur modal perusahaan. Tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) menjadi tinggi, sehingga perusahaan perlu mengungkapkan informasi lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur. Menurut Ahmed (1994) dalam Barako (2007), negara yang menggunakan institusi keuangan sebagai sumber modal utamanya, yang ditunjukkan dengan jumlah hutang di laporan posisi keuangannya, akan mengungkapkan

informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Lebih lanjut, perusahaan jenis ini cenderung mengungkapkan informasi secara detail untuk meningkatkan kesempatan mereka memperoleh dana dari institusi keuangan. Dengan mengungkapkan lebih banyak informasi, perusahaan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa penelitian menemukan tingkat *leverage* mempengaruhi tingkat pengungkapan yang diberikan perusahaan (Barako, 2007). Akan tetapi penelitian lainnya tidak menemukan hubungan antara *leverage* dan tingkat pengungkapan (Fekete, 2008; Omar, 2012; Wardani, dkk, 2012; Utami, 2012). *Leverage* yang tinggi akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:

**H8 : Tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh positif terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS**

## METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis (*hypotesis testing*). Menurut Sekaran & Bougie (2010), pengujian hipotesis biasanya menjelaskan hubungan atau membangun perbedaan antara kelompok, atau tidak berhubungannya dua atau lebih faktor dalam suatu situasi.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel diperoleh dengan cara membentuk beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, agar sampel memenuhi persyaratan yang diinginkan. Setelah dilakukan penentuan sampel dari populasi yang ada, maka diperoleh sampel sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang telah ditentukan dari 130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### 3. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan dari masing-masing *web-site* perusahaan pada periode 2011 dan 2012. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tentang perusahaan yang menjadi sampel penelitian melalui fasilitas internet dengan mengakses situs BEI dari situs masing-masing perusahaan sampel.

## 4. Variabel Penelitian

### a. Variabel Dependen (Jumlah Pengungkapan PSAK Berbasis IFRS)

Untuk menentukan jumlah pengungkapan, penelitian ini, menggunakan indeks pengungkapan (e.g. Lopes and Rodrigues, 2010 & Prihatiningtyas, 2012) untuk melihat kesesuaian jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang diberikan perusahaan dengan yang disyaratkan oleh PSAK berbasis IFRS. Menurut Hassan & Marston (2010), indeks pengungkapan adalah instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana informasi tentang item-item tertentu dilaporkan dalam bentuk pengungkapan yang dilakukan entitas.

Dalam penelitian ini indeks pengungkapan didasarkan pada informasi yang disediakan perusahaan di laporan tahunan, khususnya laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan indeks pengungkapan ini adalah untuk menentukan jumlah pengungkapan item-item tertentu dalam laporan tahunan perusahaan dibandingkan dengan item-item pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 2012. Adapun rincian item pengungkapan dan rincian jumlah item dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Rincian Jumlah Item Pengungkapan PSAK Berbasis IFRS

N o	No PSAK	Nomor IAS/IFRS	Tgl Efektif	Jlh Item
1.	PSAK 14	IAS 2 (Inventories)	1 Jan 2009	8
2.	PSAK	IAS 16 (Properti,	1 Jan	23

	16	Plant and Equipment)	2012	
3.	PSAK 30	IAS 17 (Leasing)	1 Jan 2012	32
4.	PSAK 13	IAS 40 (Investment Properti)	1 Jan 2012	39

Sumber: IAI (2012)

Untuk mengukur indeks pengungkapan, desain variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial compliance Weighted (PC Weighted)* yaitu dengan menjumlahkan item yang diungkapkan perusahaan kemudian membagi hasilnya dengan total item yang *applicable* atau sesuai dalam perusahaan (Tsalavoutas, 2008). Pengukuran dengan cara ini mengukur jumlah pengungkapan dengan cara memberi skor 1 untuk item yang diungkapkan; skor 0 pada item yang tidak diungkapkan; dan NA (*Not Applicable*) pada item yang tidak dapat diterapkan pada perusahaan tersebut (Al-Mutawaa, 2010).

$$a = \frac{b}{c} \times 100 \%$$

Dimana:

a = persentase jumlah pengungkapan wajib PSAK berbasis IFRS yang diungkapkan perusahaan manufaktur B pada tahun Y

b = Jumlah pengungkapan wajib PSAK berbasis IFRS yang diungkapkan perusahaan manufaktur B pada tahun Y

c = Jumlah pengungkapan wajib PSAK berbasis IFRS yang harus diungkapkan perusahaan manufaktur B pada tahun Y

#### b. Variabel Independen

Tabel 1.2

Variabel Independen dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen	Pengukuran Variabel
<b>Tata Kelola Perusahaan</b>	
Proporsi komisaris independen	Persentase jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris dalam dewan komisaris.
Jumlah komite audit	Persentase jumlah anggota dalam komite audit
<b>Struktur Kepemilikan</b>	
Konsentrasi	Persentase saham yang dimiliki oleh

kepemilikan	pemilik saham terbesar (>5%) dibagi dengan jumlah saham beredar
Proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing	Persentase saham yang dimiliki pihak asing dibagi dengan jumlah saham beredar
Proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham institusional	Persentase saham yang dimiliki investor institusional dibagi dengan jumlah saham beredar

Sumber: data diolah dari beberapa penelitian terdahulu

#### c. Variabel Kontrol

Tabel 1.3

Variabel Kontrol dan Pengukuran Variabel

<b>Karakteristik Perusahaan</b>	
Ukuran perusahaan	LN total aset
Tingkat profitabilitas perusahaan	ROA = $\frac{\text{net profit}}{\text{Total aset}}$ x 100%
Tingkat leverage perusahaan	Lev = $\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$ x 100%

Sumber: data diolah dari beberapa penelitian terdahulu

### 5. Teknik Analisis Data

#### a. Content Analysis

Analisis konten digunakan untuk menjawab perumusan masalah satu, yaitu untuk mengetahui jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang diberikan perusahaan. Menurut Kolbe and Burnet (1991) dalam Sekaran dan Bougie (2010), analisis konten adalah metode riset observasi yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis konten yang bersifat simbol dari semua komunikasi tercatat, seperti: koran, *website*, iklan, catatan, dan lainnya. Metode konten analisis memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah informasi tercatat dan mengidentifikasi secara sistematis properti-propertinya, seperti: kata, konsep, karakter dan lainnya.



### b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Analisis statistik digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang berkaitan dengan pengujian hipotesis, yaitu untuk melihat pengaruh proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan saham asing, kepemilikan saham institusional, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas dan tingkat *leverage* terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS.

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Agar model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik yang sah terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokolerasi dan heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan regresi berganda. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi linear berganda, koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji signifikansi parameter individual / parsial (Uji statistik t).

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat pengungkapan PSAK berbasis IFRS dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$JPPI = a + \beta_1 IND DIR + \beta_3 AUDCOM + \beta_4 LNASET + \beta_5 ROA + \beta_6 LEV + \beta_7 OWCOM + \beta_8 FRGN + \beta_9 INS + e$$

Keterangan:

JPPI : Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

a : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

IND DIR : Proporsi Komisaris Independen

AUDCOM : Jumlah Komite Audit

LNASET : Ukuran Perusahaan

ROA : Tingkat Profitabilitas

LEV : Tingkat *Leverage*

OWCOM : Konsentrasi Kepemilikan

FRGN : Kepemilikan saham oleh pihak asing

INS : Kepemilikan saham oleh pihak institusional

e : *Error term*

## HASIL DAN DISKUSI

### 1. Data Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Statistik deskriptif difokuskan kepada nilai *maximum*, *minimum*, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Statistik deskriptif dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.4  
Statistik Deskriptif Tahun 2011-2012

#### Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std Def
Jumlah Peng. PSAK Berbasis IFRS	124	61.25	96.67	80.3381	7.74104
Komisaris Independen	124	20.00	80.00	37.1599	9.57662
Komite Audit	124	40	100	63.06	10.529
Konsentrasi Kepemilikan	124	43.62	98.96	74.0358	15.92907
Kepemilikan Saham Asing	124	.85	98.96	54.4696	27.86584
Kepemilikan Saham Institusional	124	1.25	98.96	72.4626	20.05205
Ukuran Perusahaan	124	23.19	32.84	28.1591	1.64654
Tingkat Profitabilitas	124	-75.58	56.35	8.4798	15.42370
Tingkat Hutang	124	3.95	297.85	51.6076	42.35283
Valid N (listwise)	124				

Sumber: data olah SPSS versi 17.0

### 2. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

#### a. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis diindikasikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada

perusahaan manufaktur tahun 2011 – 2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah komisaris independen tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Peran komisaris independen dipandang sebagai mekanisme untuk mengawasi dan mengendalikan manajemen atau direktur untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Sesuai dengan teori agensi, komisaris independen akan menjembatani konflik antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan yaitu dewan direktur. Salah satunya adalah mengawasi manajemen dengan memberikan pengungkapan yang luas tentang perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Sutedi (2011) dalam praktiknya, sebagian perusahaan di Indonesia telah memenuhi ketentuan dengan memilih komisaris independen sesuai dengan kriteria dan semangat independensi yang diharapkan. Di lain pihak, masih banyak perusahaan yang memiliki komisaris independen yang dipertanyakan kriteria dan semangat independensinya. Lebih lanjut, menurut Sutedi (2011) proporsi komisaris independen yang hanya 30% dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris tidak secara signifikan mempengaruhi keseluruhan kebijakan dewan komisaris. Nuryaman (2009) menemukan lemahnya hubungan komposisi dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela dapat disebabkan oleh: rendahnya komposisi komisaris independen dan masih banyak emiten yang menempatkan komisaris independen yang tidak kompeten pada bidang akuntansi dan keuangan. Ini berarti, komisaris independen tidak berperan dalam menentukan jumlah pengungkapan di Indonesia.

Hasil temuan ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haniffa & Cooke (2000) yang menemukan keterkaitan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah pengungkapan di Malaysia. Hasil temuan ini juga tidak mendukung penelitian Verriest et al (2011) dan Samaha et al (2012) yang menemukan hubungan positif antara jumlah komisaris independen dengan tingkat pengungkapan. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Prawinandi dkk (2012) dan Utami Dkk (2012) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan konvergensi IFRS di Indonesia.

b. Pengaruh Komite Audit Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk komite audit, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 – 2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah komite audit tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan fungsi membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, pelaksanaan audit internal dan eksternal dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Sutedi, 2011). Keberadaan komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang dipercaya, seperti mengurangi kesalahan, iregularitas dan faktor-faktor yang menyebabkan laporan keuangan kurang dipercaya. Komite audit adalah mekanisme penting untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik.

Mujiyono & Nany (2010) menemukan bahwa jumlah pengungkapan CSR tidak berhubungan dengan jumlah komite audit. Hal ini dapat disebabkan karena kinerja yang kurang baik dari seluruh anggota komite audit dalam melaksanakan tugasnya. Kent & Stewart (2008) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan IFRS pada perusahaan Australia. Alasannya dikarenakan komite audit memiliki keahlian yang kurang dalam bidang akuntansi, sehingga ketergantungan terhadap auditor eksternal semakin besar. Lebih lanjut, jumlah komite audit yang kecil cenderung meningkatkan kebutuhan akan peran auditor eksternal untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) yang menemukan bahwa jumlah komite audit tidak berhubungan dengan tingkat pengungkapan PSAK konvergensi IFRS di perusahaan Indonesia. Samaha et al (2012) juga menemukan bahwa jumlah komite audit tidak berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela di perusahaan di Mesir. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2010) yang menunjukkan tingkat pengungkapan sukarela berhubungan positif dengan jumlah komite audit.

c. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk konsentrasi kepemilikan, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 – 2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah konsentrasi kepemilikan tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Konsentrasi kepemilikan banyak ditemukan di negara-negara dengan ekonomi bertumbuh seperti di Indonesia. Sebaliknya di negara-negara *Anglo Saxon*, seperti di Inggris dan Amerika, struktur kepemilikan sangat menyebar (La Porta et al, 1998). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi kepada beberapa pemilik menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan pada suatu pihak tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur perusahaan (Sutedi, 2011). Konsentrasi kepemilikan akan mendorong pemilik saham terbesar cenderung kurang independen dalam transparansi dan pengungkapan informasi. Hal ini dikarenakan, mereka dapat memperoleh langsung informasi dengan cara informal langsung ke perusahaan (Jieng et al dalam Yuen et al, 2009).

Konsentrasi kepemilikan yang besar dapat menurunkan jumlah pengungkapan yang diberikan perusahaan. Hal ini dikarenakan, pemegang saham pengendali dapat mengakses informasi yang diperlukan secara langsung ke perusahaan tanpa melalui laporan keuangan dan laporan tahunan. Selain itu beberapa informasi penting sengaja

ditahan oleh manajemen dan atau pemegang saham mayoritas untuk menghindari dimanfaatkannya informasi tersebut oleh para pesaing perusahaan (Nuryaman, 2009). Pemegang saham mayoritas tidak tertarik dengan pengungkapan yang tersedia di laporan tahunan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi besar kecilnya jumlah pengungkapan di Indonesia.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barako (2007) yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berhubungan positif dengan jumlah pengungkapan sukarela di Kenya. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan Nuryaman (2009) yang menemukan hubungan positif dengan rata-rata rendah antara pengungkapan sukarela dan konsentrasi kepemilikan di Indonesia.

d. Pengaruh Kepemilikan Saham Asing Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk kepemilikan saham oleh pihak asing, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011–2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah saham yang dimiliki oleh individu maupun lembaga asing atau luar negeri pada saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan oleh pihak asing dianggap dapat meningkatkan jumlah pengungkapan dikarenakan kebutuhan yang besar dari pemilik asing untuk mengawasi manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya akan menghadapi masalah asimetri informasi karena hambatan geografis ataupun kendala bahasa. Sehingga perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang besar akan lebih memperhatikan jumlah pengungkapan informasi dalam laporan tahunannya.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Hal ini dapat disebabkan

karena pemilik asing beranggapan bahwa Indonesia telah mengadopsi IFRS secara bertahap dan implementasi penuh telah dilakukan pada tahun 2012. Sehingga tidak diperlukan lagi pengawasan mengenai jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lopes & Rodrigues (2010) yang menemukan bahwa status internasional perusahaan akan meningkatkan jumlah pengungkapan IAS. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Barako (2007) yang menemukan kepemilikan asing berpengaruh terhadap jumlah pengungkapan sukarela di Kenya.

e. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk kepemilikan saham oleh pihak institusional, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011–2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusional yang merupakan pihak luar perusahaan. Umumnya kepemilikan institusional dimiliki oleh para pemegang saham besar. Dengan kepemilikan saham yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat untuk memantau praktik pengungkapan perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat mengungkapkan secara sukarela informasi untuk memenuhi harapan investor institusional.

Hasil statistik menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Ini berarti, kepemilikan institusional tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Pengungkapan PSAK berbasis IFRS adalah pengungkapan *mandatory* atau

pengungkapan wajib yang diatur Bapepam. Investor institusional menganggap perusahaan telah sepenuhnya memenuhi aturan pengungkapan Bapepam, sehingga tidak diperlukan pengawasan lain. Bagaimanapun, perusahaan akan berupaya untuk memenuhi regulasi Bapepam untuk menghindari sanksi.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengungkapan CSR di perusahaan non-keuangan di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Utami (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengungkapan konvergensi IFRS di perusahaan Indonesia.

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 – 2012. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah ukuran perusahaan menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung berhubungan dengan pemangku kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menyediakan informasi-informasi yang membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut sesuai dengan teori biaya politik (*political cost theory*), perusahaan dengan ukuran besar memiliki biaya politik yang tinggi, sehingga diharapkan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak (Lopes & Rodrigues, 2010).

Perusahaan yang besar memiliki pemangku kepentingan yang beragam dengan jenis, jumlah dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk itu perusahaan dengan ukuran besar berupaya memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, perusahaan besar

memiliki pemegang saham dengan jumlah kepemilikan saham yang besar. Untuk mengurangi biaya keagenan perusahaan dan informasi asimetris, manajemen perusahaan berupaya menyediakan informasi yang memadai. Perusahaan besar juga cenderung memiliki jumlah dan nilai aset yang besar, yang juga berarti memiliki banyak akun, sehingga banyak item-item pengungkapan yang dapat dipenuhi perusahaan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fekete et al yang menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan tingkat kesesuaian pengungkapan IFRS di Hungaria. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Omar (2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan IFRS di perusahaan terdaftar di Bahrain.

#### g. Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk tingkat profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011 – 2012. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat profitabilitas tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

Menurut teori sinyal (*signalling theory*), informasi dalam laporan keuangan dapat mengirimkan sinyal ke pasar (Ross, 1977). Tingkat profitabilitas memberikan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, tingkat laba yang baik akan direspon positif oleh pasar, begitu juga sebaliknya. Dengan meningkatnya profitabilitas, perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan dari investor. Sumber pendanaan yang bertambah berarti meningkatkan jumlah dan jenis pemangku kepentingan dalam perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu memperhatikan jumlah pengungkapan informasi yang dilakukannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Natalia & Zulaikha (2012) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan CG dalam laporan tahunan. Ketika perusahaan mengalami penurunan profitabilitas, perusahaan akan cenderung memberikan informasi lebih pada pengungkapan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tekanan pasar dan meyakinkan pasar akan kinerja perusahaan pada periode mendatang (Kusumawati, 2007).

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) dan Prawinandi (2012) yang menemukan bahwa tingkat profitabilitas tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan konvergensi IFRS di Indonesia. Begitu juga dengan penelitian yang Al Mutawaa (2010) dan Omar (2012) yang menemukan tidak signifikannya variabel tingkat profitabilitas terhadap jumlah pengungkapan IFRS di Kuwait dan Bahrain.

#### h. Pengaruh Tingkat Leverage Terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK berbasis IFRS

Dari hasil pengujian hipotesis untuk tingkat *leverage*, dapat disimpulkan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan manufaktur tahun 2011–2012. Hal ini berarti besar kecilnya tingkat *leverage* tidak menjamin luasnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS pada perusahaan.

*Leverage* merupakan proporsi penggunaan hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasinya. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat meningkatkan kesempatan untuk memperoleh dana dari institusi lainnya dan meningkatkan kepercayaan kreditur dan pemangku kepentingan lainnya akan kemampuan perusahaan.

Mujiyono & Nany (2010) menemukan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan sukarela dapat disebabkan baik kreditur maupun investor kurang memperhatikan kualitas *leverage* perusahaan, sehingga kurang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Al Mutawaa (2010) menemukan bahwa tingkat *leverage* berhubungan negatif tidak signifikan

dengan tingkat pengungkapan. Hal ini dikarenakan, institusi keuangan seperti bank tidak mengandalkan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, tapi memperoleh langsung informasi langsung kedalam perusahaan. Kemudian Natalia dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan CG dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai tingkat resiko yang tinggi pula. Oleh karena itu mereka akan mengurangi tingkat pengungkapan yang diberikan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fekete (2008), Omar (2012) dan Utami (2012) yang tidak menemukan hubungan tingkat *leverage* dengan tingkat pengungkapan IFRS di Hungaria, Bahrain dan di Indonesia.

### 3. Diskusi Hasil Pembahasan

Hasil hipotesis dari uji statistik menunjukkan bahwa variabel independen serta beberapa variabel kontrol tidak mempengaruhi jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Pengungkapan PSAK berbasis IFRS merupakan pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*), sehingga perusahaan akan berupaya memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Tetapi belum penuhnya pengungkapan PSAK berbasis IFRS yang diberikan perusahaan menunjukkan bahwa peran tata kelola perusahaan belum maksimal. Struktur tata kelola perusahaan belum mampu mendorong perusahaan untuk menerapkan PSAK berbasis IFRS dan mengungkapkannya secara penuh.

Penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia mengalami beberapa kendala (Lukviarman, 2007). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, diantaranya yaitu: sistem hukum yang dianut dan pengaruh budaya Indonesia. Sistem hukum berkaitan dengan masalah kondusifnya iklim berusaha dan menyangkut pelaksanaan dan kepastian hukum di Indonesia. Sedangkan budaya masyarakat Indonesia mempengaruhi perilaku bagaimana tata kelola dijalankan. Dua kendala ini menyebabkan tata kelola perusahaan di Indonesia

menjadi kurang efektif dalam fungsi dan pelaksanaannya.

Studi yang dilakukan La Porta (1998) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia menganut pola *Continental European System*. Walaupun sistem tata kelola perusahaan Indonesia adalah kontinental Eropa, namun penerapan tata kelolanya berbeda secara signifikan. Dalam sebuah survei di sembilan negara di Asia, Indonesia berada di peringkat terakhir dalam masalah kondusifnya iklim berusaha, terutama menyangkut pelaksanaan dan kepastian hukum. Dibanding Filipina yang juga menganut sistem perundangan *the French Civil-Law Tradition*, peringkat Indonesia lebih rendah (La Porta 1998 dan CLSA 2001 dalam Lukviarman, 2007). Ini menunjukkan masalah hukum tidak hanya menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas tata kelola perusahaan di Indonesia (Lukviarman, 2007).

Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang cukup ditinjau dari sudut legal-formalnya, namun pelaksanaan taat hukum masih menjadi masalah klasik yang harus dihadapi. Menurut Tabulajan (2002) dalam Lukviarman (2007), Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam budaya atau *legal culture* untuk membentuk masyarakat yang taat hukum dan asas, sehingga perangkat dan institusi hukum yang dibentuk dapat berfungsi. Lebih lanjut, Lukviarman (2007) menyatakan bahwa nilai budaya tradisional menjadi aturan yang dominan dibandingkan aturan hukum yang bersifat legal-formal.

Pengaruh nilai-nilai informal dibanding aturan legal-formal tidak memberikan dampak negatif jika didasarkan pada prinsip moral yang jelas. Bagaimapun nilai-nilai informal juga bertujuan untuk kebaikan masyarakat banyak. Aturan legal-formal dan nilai-nilai informal, pada dasarnya mempunyai tujuan yang baik dan benar, namun penyimpangan terjadi di dalam praktiknya (Lukviarman, 2007). Sikap oportunistik dari banyak pelaku bisnis mengakibatkan mereka memanfaatkan peluang yang menguntungkan saja dan merugikan pihak lainnya. Bagaimanapun, tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan. Jika individu

yang berada dalam mekanisme tata kelola perusahaan tidak menunjukkan perilaku baik, pengelolaan dan pengendalian perusahaan juga terkena dampaknya.

Pengaruh struktur hukum dan budaya menjadi kendala dalam penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia. Struktur hukum menyangkut pelaksanaan dan kepastian hukum yang dijalankan di Indonesia, sedangkan budaya mempengaruhi bagaimana praktik tata kelola perusahaan dijalankan. Dua faktor ini mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan yang dampaknya dapat dilihat dari jumlah pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan.

## SIMPULAN

### 1. Kesimpulan

- a. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS memiliki nilai rata-rata sebesar 80.33%, yang mana jumlah ini lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya, seperti di negara Uganda (34%) (Sejjaka, 2003), Hungaria (62%) (Fekete et al, 2008), Kuwait (69%) (Al Mutawaa, 2010), dan Yunani (80%) (Tsalavoutas, 2010).
- b. Dari hasil analisis yang dilakukan untuk setiap PSAK berbasis IFRS yang diteliti ditemukan bahwa: jumlah pengungkapan tertinggi adalah PSAK 14 sebesar 88.1%, kemudian jumlah pengungkapan PSAK 13 sebesar 78.12%, jumlah pengungkapan PSAK 30 sebesar 76.96%, dan jumlah pengungkapan PSAK 16 sebesar 75.64%.
- c. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS dipengaruhi oleh proporsi komisaris independen sebesar  $B = -0.081$  dengan signifikansi 0.292, komite audit memiliki  $B = -0.008$  dengan signifikansi 0.905, konsentrasi kepemilikan memiliki  $B = -0.131$  dengan signifikansi 0.081, kepemilikan saham oleh pihak asing memiliki  $B = -0.009$  dengan signifikansi 0.813, kepemilikan saham oleh pihak institusional dengan  $B = 0.039$  dan signifikansi 0.529, ukuran perusahaan dengan  $B = 0.987$  dan signifikansi 0.042, tingkat profitabilitas dengan  $B = -0.040$  dan signifikansi 0.415, dan tingkat *leverage* dengan  $B = 0.020$  dengan signifikansi 0.243. Dari nilai ini dapat dilihat bahwa: variabel independen, yaitu:

proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan oleh pihak asing dan kepemilikan oleh investor institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Begitu juga, dengan variabel kontrol: tingkat profitabilitas dan tingkat *leverage* terbukti tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS. Sedangkan variabel kontrol mengenai ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS.

- d. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan PSAK berbasis IFRS paling besar dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki pemangku kepentingan yang berbeda-beda, sehingga perusahaan berupaya memenuhi informasi melalui pengungkapan yang tinggi. Selain itu perusahaan besar memiliki jumlah dan nilai aset yang juga besar, sehingga memiliki banyak akun yang harus diungkapkan.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. hasil perhitungan regresi linier dalam penelitian ini menunjukkan  $R^2 = 0.136$  yang berarti cukup rendah.
- b. penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua perusahaan.

### 3. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur seharusnya mengungkapkan item-item pengungkapan yang disyaratkan PSAK berbasis IFRS dengan lebih luas untuk menyediakan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mewakili tata kelola perusahaan, seperti jumlah direktur, jumlah rapat dewan

direktur dan komite audit, proporsi komisaris perempuan, kepemilikan manajemen, kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, dan jenis auditor yang berperan dalam mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Lebih lanjut, untuk memperoleh penelitian yang lebih baik, sebaiknya penelitian berikutnya memperluas sampel penelitian yang lebih luas.

3. Jumlah pengungkapan yang diteliti hanya menggunakan data dari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan saja. Akan lebih baik jika peneliti selanjutnya dapat memperoleh data primer perusahaan, untuk menentukan jumlah pengungkapan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Tarmizi & Primastuti, Sinung. 2012. *Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis*. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1, Nomor 2.
- Adilah, Wan Izyani et al. 2010. *Corporate Governance Mechanisms and Extent of Disclosure: Evidence from Listed Companies in Malaysia*. International Business Research, Vol. 3, No. 4.
- Akhtaruddin, M., 2005. *Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh*, The International Journal of Accounting, Vol. 40: 399– 422.
- Akman, N. H. 2011. *The Effect of IFRS Adoption on Financial Disclosure: Does Culture Still Play A Role.*, American International Journal of Contemporary Research 1(1), 6-17.
- Aksu, M. (2006). "Transparency and Disclosure in the Istanbul Stock Exchange: Did Ifrs Adoption and Corporate Governance Principles Make a Diference?" Working paper, Sabanci University. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://research.sabanciuniv.edu/820/1/3011800000668.pdf>
- Albright, Thomas L & Ingram, Robert W. 2007. *Financial accounting : A User Prespective*. Thomson South Western. China. International Student Edition.
- Al Mutawaa, Abdullah. 2010. *Dislosure Level and Compliance with IFRSs: An Empirical Investigation of Kuwaiti Companies*. International Business & Economics Research Journal.
- Amoako, Gilber K & Asante Stephen. 2012. *Compliance with International Financial Reporting Standard 7 (IFRS 7): A Study of Listed Banks in Ghana*. Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 4, 2012.
- Angraini, Dwi Ririn. 2011. *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan dalam Annual Report*. Skripsi diterbitkan. Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 2 Februari 2013. [http://eprints.undip.ac.id/26641/1/FULL TEXT\\_%28r%29.pdf](http://eprints.undip.ac.id/26641/1/FULL_TEXT_%28r%29.pdf)
- Apostolou, K. Apostolos & nanopoul. A. Konstantinos. 2009. *Voluntary Accounting Disclosure and Corporate Governance: Evidence from Greek Listed Firms*. International Journal Accounting and Finance, Vol 1. No. 4.
- Ball, R., 2006. *International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors*. Accounting and Business Research, International Accounting Forum: 5-27.
- Barako, G. Dulacha. 2007. *Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies*



- Annual Reports*. African Journal of Business Management Vol. 1(5) pp. 113-128.
- Beekes, W. And Brown, P. (2006). "Do Better Governed Australian Firms Make More Informative Disclosures?" , Journal of Business Finance & Accounting, 33 (3): pp. 422-450
- Cahyati, Ari, Dewi. 2011. *Peluang Manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS: Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. JRAK Vol.2 No.1. diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/jrak/article/view/61/59>
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi ke tiga, Universitas Diponegoro.
- Craig, Russel & Joselitto, Diga. 1998. *Corporate Accounting Disclosure in ASEAN*. Journal of International Financial Management and Accounting 9:3.
- Choi, Frederick D.S, & Meek, Gary K. 2008. *International Accounting*. Sixth edition. Pearson International Edition. Pearson prentice hall, US.
- Cheng, E. and Courtenay, S. (2006) *Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure*. The International Journal of Accounting, 41, pp. 262–289.
- Christensen H., Lee, E., & Walker, M., 2007. *Do IFRS/UK-GAAP Reconciliations Convey New Information?*. Journal of Accounting Research, Forthcoming, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=997800>.
- Diyanti, Ferry. 2010. *Mekanisme Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan, dan Mandatory Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indonesia*. Tesis diterbitkan. Universitas Mulawarman. Diunduh pada tanggal 18 Agustus 2013
- Daske, H. And Gebhard, G. (2006). "International Financial Reporting Standards and Experts' Perceptions of Disclosure Quality", Abacus, 42 (3-4):pp. 461-498.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta. Diakses tanggal 2 Februari 2013. [http://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi\\_booklet\\_ii.pdf](http://muhariefeffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf)
- Fekete, Szilveszter; Matis, Dumitro & Lukacs, Janos. 2008. *Factors Influencing the Extent of Corporate Compliance with IFRS. The Case of Hungarian Listed Companies*. Working Paper Series. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1020081/2.pdf>
- Fama, E.F. and Jensen, M.C. 1983. *Separation of Ownership and Control*. The Journal of Law and Economics, June, Vol.25:301-325
- Fama, E.F. 1980. *Agency problems and theory of the firm*. Journal of Political Economy, vol. 88, pp. 288-307.
- Ferrer, Rodiel C & Ferrer, Glenda J. 2011. *The relationship between profitability and the level of compliance to the International Financial Reporting Standards (IFRS): an empirical investigation on publicly listed corporations in the Philippines*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.freepatentsonline.com/article/Academy-Accounting-Financial-Studies-Journal/274409724.html>
- Gernon, Helen & Meek, Gary K. 2001. *Akuntansi perspektif internasional*. edisi 5. dan. 2001. Edisi bahasa Indonesia. Penerbit Andi.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gibbins, Micheal, et. Al. 1990. *The Management of Corporate Disclosure: Opportunism, Ritualism, Policies and Process*. Journal of Accounting Research (Spring 1990), 28(1), pp. 121-143.
- Haniffa, Ros & Cooke, Terry. 2000. *Culture, Corporate Governance, and Disclosure in*

- Malaysian Corporations*. Paper at Asian AAA World Conference Singapore. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://business-school.exeter.ac.uk/documents/papers/accounting/2000/0007.pdf>
- Hassan, Omaima A.G. 2009. *The value relevance of disclosure: Evidence from the emerging capital market of Egypt*. The International Journal of Accounting 44 (2009). Pp. 79 – 102.
- Hassan, Omaima & Marston, Claire. 2010. *Disclosure Measurement In The Empirical Accounting Literature - A Review Article*. Diakses tanggal 2 Februari 2012. <http://www.qass.org.uk/2011-May-Brunel-conference/Hassan.pdf>
- Hassan, Tanweer & Karim AKM Waresul. 2005. *Regulatory Change and the Quality of Compliance to Mandatory Disclosure Requirements: Evidence from Bangladesh*. Working Paper Series.
- Healy, P.M. and Palepu, K.G. (2001) Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, *Journal of Accounting and Economics*, 31, Pp. 405-440.
- Hossain Mohammed. 2008. *The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case of India*. European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.23 No.4 (2008), pp.659-680 © EuroJournals Publishing, Inc. <http://www.eurojournals.com/ejsr.htm>
- Hossain, Mohammed & Hammami, Helmi. 2009. *Voluntary Disclosure in the Annual Reports of an Emerging Country: the Case of Qatar*. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting 25. Pp. 255-265.
- Huafang, Xiao dan Jianguo, Yuan. 2007. *Ownership structure, Board Composition, And Corporate Voluntary Disclosure: Evidence From Listed Companies In China*. Managerial Auditing Journal Vol 22 No.6.
- IAI. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan: Per 1 Juni 2012*. IAI. Jakarta.
- Jensen, M. C., & W. H. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
- Keiteman, David; Stonehil, I. Arthur; Moffert, H. Michael. 2007. *Multinational business finance*. Pearson international edition. Eleventh edition. US.
- Kent, Pamela & Stewart, Jenny. 2008. *Corporate Governance and Disclosure on the Transition to International Financial Reporting Standards*. Bond University, ePublications@bond.
- Khodadi, Vali; Khazami, Soheila & Afflatooni, Abbas. 2010. *The Effect of Corporate Governance Structure on the Extent of Voluntary Disclosure in Iran*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.saycocorporativo.com/saycoUK/BIJ/journal/Vol3No2/BIJ-Vol3No2-July2010.pdf#page=153>
- Kieso, Donald E; Jerry, J Weygandt; Warfield, Terry D. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi kedua belas, jilid 3. Erlangga.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, Jakarta: KNKG.
- Kusumawati, Dwi Novi. Profitability and Corporate Governance Disclosure: an Indonesian Study. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 10, No.2. hal 131-146. Diakses tanggal 5 April 2013. <http://akt.fe.unib.ac.id:81/input/Symposiums/5.pdf>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer A., & Vishny, W.R., (1998). Law and finance, *Journal of Political Economy*, Vol. 106, No. 6: 1113-1155.

- Lopes, Teixeira Patricia & Rodrigues, Lima Lucia. 2007. *Accounting for Financial Instruments: An Analysis of the Determinants of Disclosure in the Portuguese Stock Exchange*. *The International Journal of Accounting*, Vol. 42, No. 1: 25–56.
- Lopes, P. And Viana, R. (2007). “*The Transition to IFRS: Disclosures by Portuguese Listed Companies*”. Working paper, Faculdade De Economia Do Porto. Diakses tanggal 2 Februari 2013. [http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/08.08.05\\_wp285.pdf](http://www.fep.up.pt/investigacao/workingpapers/08.08.05_wp285.pdf)
- Lukviarman, Niki. 2007. *Board Governance: Menuju Penguatan Implementasi Corporate Governance di Indonesia: Pidato Pengukuhan*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Martani, Dwi. 2011. *Perkembangan PSAK –IFRS*. Diakses tanggal 10 September 2012. <http://staff.blogui.ac.id/martani/files/2011/04/perkembangan-PSAK-Singkat.pptx>
- Morris, Richard D; Susilowati Isabelle & Gray, Sidney J. 2012. *The Impact of IFRS Adoption versus Non-Adoption on Corporate Disclosure Levels in the Asian Region*. Diakses tanggal 5 April 2013. <http://www.unisa.edu.au/Global/business/centres/cags/docs/seminars/GRAY%20PAPER%20MorrisSusilowatiGrayImpactofIFRSonDisclosureinAsianRegion%20July2012.pdf>
- Mujiyono dan Nany, Magdalena. 2010. *Pengaruh Leverage, Saham Publik, Size, dan Komite audit Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 2, No. 2, September 2012, 129-134. Diakses tanggal 12 Maret 2013. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/1936/2054>.
- Natalia, Petri & Zulaikha. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ-45 Bursa Efek Indonesia)*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1, Nomor 2. Diakses tanggal 12 Maret 2013. <http://eprints.undip.ac.id/36932/1/NATALIA.pdf>
- Nuryaman, 2009. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan sukarela*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 6 – Nomor 1, Juni 2009.
- Omar, I.H. Juhmani. 2012. *Factors Influencing the Extent of Corporate Compliance with IFRS: Evidence from Companies Listed in Bahrain Stock Exchange*. *Journal of International Business and Economics*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-International-Business-Economics/293950230.html>
- Pramono, Ferry Adriawan. 2011. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam LQ-45)*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 5 Juni 2013. <http://eprints.undip.ac.id/29448/1/Skripsi017.pdf>
- Prawinandi, Wardani, dkk. 2012. *Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/067-CG-21.pdf>
- Prihatiningtyas, Lailly. 2011. *Hedge Accounting Disclosure under IAS 39 and IFRS 7: an Analysis of Hedge Accounting Disclosure Policy in The Netherland’s Listed Firms*. Published Thesis. Master thesis Department Accountancy Faculty of Economics and Business Studies Tilburg University. Diakses tanggal 12 Maret 2013. <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=116019>
- Tsalavoutas, Ioannis. 2010. *Transition to IFRS and Compliance with Mandatory Disclosures: What is the Signal*. Working Paper Series. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/1070>

- [5/1/Transition%20to%20IFRS%20and%20Compliance%20with%20Mandatory%20Disclosure%20Requirements%20What%20is%20the%20signal.pdf](#)
- Reimers Jane, L. 2008. *Financial Accounting – A Business Process Approach*. Second edition. Pearson Education. Inc. United States of America.
- Ross, S. A. 1977. *The Determination of Financial Structure: the incentive-signaling approach*. The Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40. <http://dx.doi.org/10.2307/3003485>
- Ross, Stephen. A. 1973. *The Economic theory of Agency: The Principals Problem*. American Economic Association. Vol. 63. No. 2. Pp. 134-139
- Rouf, Md. Abdur. 2010. *Corporate Characteristics, Governance Attributes and the Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh*. ISSN 2229-3795. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.academicjournals.org/ajbm/pdf/pdf2011/9Sept/Rouf.pdf>
- Schroeder, Richard G; Clark, Myrtle W & Cathey, Jack M. 2009. *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. Ninth Edition. John Wiley & Sons, Inc. United States of America.
- Sekaran, Uma & Bougie Roger. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Fifth Edition. John Wiley & Sons Ltd. UK.
- Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1997). A survey of corporate governance. *Journal of Finance*, vol. 52, pp. 737-783.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. 1986. *Large Shareholders and Corporate Control*. Journal of Political Economy, 94, 461-488.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tim Studi. 2010. *Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota ACMF*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan. Diakses tanggal 2 Februari 2013. [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/kajian\\_pm/studi-2010/PEDOMAN\\_GCG\\_DI\\_NEGARA\\_ANGGOTA\\_ACMF.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2010/PEDOMAN_GCG_DI_NEGARA_ANGGOTA_ACMF.pdf)
- Tsalavoutas, Ioannis. 2011. *Value Relevance of IFRS Mandatory Disclosure Requirements*. Working Paper Series. Diakses tanggal 2 Februari 2013. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1734753](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1734753)
- Tsalavoutas I. 2011. *Transition to IFRS and compliance with mandatory disclosure requirements: What is the signal?*. Advances in Accounting, 27 (2), pp. 390-405.
- Utami, Dwi. Wulan, dkk. 2012. *Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://eprints.undip.ac.id/17066/1/34.pdf>
- Verriest, Arnt; Gaeremynck, Ann & Thornton, B. Daniel. 2010. *Corporate Governance and Properties of IFRS Adoption*. Diakses tanggal 2 Februari 2013. <http://www.econtrack.nl/uploads/document/corporate%20governance%20and%20properties%20of%20IFRS%20Adoption.pdf>
- Yuen, Desmond C.Y., et al. 2009. *A Case Study of Voluntary Disclosure by Chinese Enterprises*. Asian Journal of Finance & Accounting. Vol. 1, No. 2: E6
- [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id). 2012. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-347/BL/2012 tentang

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Dikases tanggal 2 Februari 2013.

<http://www.bapepam.go.id/old/old/profil/fungsi/>.  
2013. Fungsi Bapepam Indonesia. Diakses tanggal 5 Agustus 2013.